

SALINAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 82 TAHUN 2022

**TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2022**

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1033);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022 untuk memberikan penilaian secara mandiri khusus bagi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Tim Penilai Mandiri dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Mandiri sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU terdiri atas Tim Asesor dan Tim Kerja dengan tugas sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab bertanggung jawab terhadap penilaian mandiri indeks reformasi hukum khusus bagi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Tim Asesor terdiri atas:
 - a. Koordinator Tim Asesor bertugas:
 - 1) memastikan penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan sasaran;
 - 2) memonitor penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - 3) menyampaikan laporan hasil penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - b. Tim Asesor bertugas melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

3. Tim Kerja bertugas:
 - a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian indeks reformasi hukum; dan
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
4. Tim Sekretariat bertugas:
 - a. membantu menyiapkan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian indeks reformasi hukum; dan
 - b. membantu mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

KETIGA : Tim Penilai Mandiri melaksanakan tugas pada Diktum KEDUA sesuai dengan kalender kerja sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Penilai Mandiri bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2022
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

ROBIN ASAD SURYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI
MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2022

NOMOR : 82 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 Agustus 2022

**TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2022**

No	Kedudukan dalam Tim	Nama/ Jabatan
1.	Penanggung Jawab	Robin Asad Suryo Sekretaris Utama
2.	Koordinator Tim Asesor	Suharti Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia
3.	Tim Asesor	1. Rinaldi Morintoh 2. Rasmita Juliana Sitepu
4.	Tim Kerja	1. Ardian Hoppin Sitompul 2. Benny Leopold Dumais 3. Cherish Shery Desarya 4. Asih Riska Nurmasari
5.	Tim Sekretariat	1. Mahatmya Widyasri 2. Stephanus Karmel Nugraha Kopong Miten

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

ROBIN ASAD SURYO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENILAI MANDIRI INDEKS
REFORMASI HUKUM PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN 2022

NOMOR : 82 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 Agustus 2022

KALENDER KERJA
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2022

No.	Kegiatan	Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengunggahan Data Dukung dan Verifikasi Penilaian Mandiri Dalam Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum								

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

ROBIN ASAD SURYO